

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus menanggapi hal ini dengan tegas dan serius. Setiap elemen dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki komitmen yang kuat dan saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien (Fadila & Budiwitjaksono, 2022)

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik mengenai kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. (Aprilianti *et al.*, 2020).

Berikut ini merupakan tabel laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kuningan periode 2018-2020.

Tabel 1.1
Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022

| No. | Tahun | Nilai | Predikat | Kategori |
|-----|-------|-------|----------|----------|
| 1. | 2018 | 65,05 | B | Baik |
| 2. | 2019 | 66,00 | B | Baik |
| 3. | 2020 | 66,95 | B | Baik |
| 4. | 2021 | 66,38 | B | Baik |
| 5. | 2022 | 66,39 | B | Baik |

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan selaku pemerintah daerah di Jawa Barat selama 5 tahun berturut-turut hanya mencapai predikat B dari tahun 2018-2022, predikat ini didapat dari hasil evaluasi LAKIP. Predikat tersebut belum termasuk kategori ideal karena nilai capaian angka yang baik dari ketentuan pemerintah yaitu predikat BB dengan nilai 71 sampai 80 sesuai yang telah ditentukan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi Republik Indonesia (Bloom & Reenen, 2013). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kuningan harus terus berupaya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerjanya dengan memperoleh predikat atau kriteria yang lebih tinggi, dikarenakan pihak pemerintah tau instansi sudah mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program serta sasaran yang telah ditetapkan ditahun-tahun sebelumnya. untuk mengetahui adanya program atau sasaran yang gagal pemerintah dapat melakukan evluasi kepada instansi-instansi supaya pencapaian kinerjanya bisa terus meningkat dan memperoleh predikat yang lebih tinggi dan memuaskan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, kualitas laporan keuangan, dan penerapan anggaran berbasis kinerja. Faktor yang pertama adalah sistem pengendalian internal pemerintah. suatu sistem pengendalian yang harus di terapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kualitas dalam laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula (Fitrawati et al., 2017).

Menurut hasil penelitian Nasir & Gunawan, (2019) sistem pengendalian internal pemerintah terhadap AKIP adalah signifikan, menurut Mattoasi *et al.*, (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintahan, menurut Kharisma P *et al.*, (2021) sistem pengendalian intern berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hasil penelitian menurut Heluka *et al.*, (2022) sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah, menurut Aziz & Susilowati, (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut Reza Viola *et al.*, (2023) variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja pemerintah.

Selain sistem pengendalian internal pemerintah, faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawaty, (2015) kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, menurut Ridzal, (2020) kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan, dan menurut Wiguna *et al.*, (2021) Kualitas Laporan Keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akan semakin menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintahan. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja dapat diukur dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan keuangan merupakan laporan hasil (output) sedangkan masukannya (input) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam sistem pencatatan, maka keseluruhan input harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi (Toto Prihadi, 2013). Laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci dimana akuntabilitas diharapkan dan dapat ditunjukkan. Penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan oleh stakeholder Melalui laporan keuangan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah (Anggraeni & Saleh, 2020).

Menurut hasil penelitian Syamsul, (2018) penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Kertiani *et al.*, (2020) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian menurut Wisdaningrum, (2022) penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut Ferniyanti *et al.*, (2019) penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Faktor ke empat yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Kualitas Relasional. Kualitas relasional dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan kerjasama antar anggota tim. Hubungan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan saling pengertian, mendukung pencapaian tujuan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Florini (2007) dalam Ghergari (2012) menguraikan arti transparansi dalam konteks kehidupan bernegara. Transparansi adalah nilai-nilai demokrasi, yang mengharuskan konsentrasi kebijakan informasi dan praktik keterbukaan informasi oleh pemerintah dijalankan dalam kehidupan demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam tesisnya bahwa dalam demokrasi, informasi tentang pemerintah menjadi milik rakyat, bukan pemerintah. Sedangkan, makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia dapat dilihat dalam dua hal yaitu; pertama, salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan. Kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diatur dalam UU

28 tahun 1999. Dalam konteks komunikasi public di lingkungan pemerintahan, UU No 14 Tahun 2008 merupakan pedoman dalam mengelola informasi. (Moka, 2016).

Berdasarkan fenomena diatas dan perbedaan pendapat dari peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Relasional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah, kualitas laporan keuangan, dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Bagaimana pengaruh kualitas relasional terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan fakta dan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kualitas laporan keuangan, dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pengaruh kualitas relasional terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mengenai kinerja keuangan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi yaitu Akuntansi Pemerintahan mengenai bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan perbandingan dengan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menambah wawasan penulis, karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan dengan mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan Kualitas Relasional.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman penelitian dalam bidang penelitian, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bacaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan wawasan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.